

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* adalah pemilik dan *agen* adalah orang yang dibayar oleh pemilik untuk menjalankan sebuah perusahaan.

Teori keagenan menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi “perilaku mementingkan diri sendiri”. Manajer sebuah perusahaan sebagai individu memiliki tujuan pribadi yang mungkin saja tidak sejalan dengan tujuan pemegang saham untuk memaksimalkan kekayaan. Karena manajer memiliki hak untuk mengelola aset kekayaan perusahaan, sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan mendorong manajer untuk tidak memaksimalkan usahanya (Jensen dan Meckling, 1976).

2.2 Teori Stakeholder

Istilah stakeholder awalnya diperkenalkan oleh *Stamford Research Institute* (SRI), yakni merujuk kepada “those groups without whose support the organization would cease to exist” (Freeman (1983) dalam Yohanes & Josua, 2013). Inti dari pemikiran itu kurang lebih mengarah pada keberadaan suatu organisasi yang sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. Dalam mengembangkan stakeholder theory, Freeman (1983) memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder.

Menurut Clarkson (1995) *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder (Clarkson, 1995). *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi :*shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya. Dari dua jenis *stakeholder* diatas, *stakeholder* primer adalah *stakeholder* yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan

karena mempunyai *power* yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya perusahaan.

2.3 Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan “...a systems-oriented view of organisation and society ...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the state, individuals and group”(Gray et. al, 1996) . Dari definisi tersebut legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem yang berorientasi kepada masyarakat, operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat dan lingkungan sekitar. Perlu diingat bahwa legitimasi dari masyarakat tidaklah tetap sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan bergantung bagaimana perusahaan secara terus menerus berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan harapan dan tuntutan masyarakat (Walden dan Schwartz, 1997).

2.4 Kepemilikan Saham Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Machmud dan Djakman, 2008).

Menurut Chapple dan Moon (2005) pertama, secara umum sistem Barat telah terasosiasi dengan level yang lebih tinggi pada kekayaan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara Asia sehingga akan lebih mudah dalam menghasilkan surplus untuk mendanai kegiatan CSR. Kedua, masyarakat sipil di negara-negara Barat merangsang CSR melalui tuntutan masyarakat yang lebih besar dan harapannya pada tanggung jawab bisnis. Ketiga, pemerintah Barat lebih berkembang, baik dari sistem regulasi maupun hukum dalam CSR, sehingga CSR di Barat lebih baik daripada Asia. Struktur kepemilikan asing dapat diukur dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Total saham asing yang dimaksud adalah jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak asing pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun.

2.5 Umur Perusahaan

Menurut Nugroho (2012) umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis. Dalam mengukur umur perusahaan menurut Ulum (2009) umur perusahaan dihitung mulai tanggal IPO hingga tanggal laporan tahunan.

2.6 Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Menurut Howard R. Bowen sebagai Bapak CSR dalam bukunya yang berjudul "*Social Responsibility of the Businessman*" mendefinisikan CSR sebagai:

"Obligation of businessman to pursue those policies, to make those decision or to follow those line of action which are desirable in term of objectives and values of our society."

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggungjawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun pembangunan.

Menurut ISO 26000 Karakteristik dari *Social Responsibility* adalah kemauan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggungjawab atas

dampak dari keputusan serta aktivitas yang memengaruhi masyarakat dan lingkungan. Secara konseptual, *Corporate Social Responsibility* adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (ACCA, 2004 dalam Anggraini, 2006).

Saat ini implementasi pelaporan berkelanjutan bagi Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai CSR ditegaskan kembali pada PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

2.7 Global Reporting Initiative(GRI) - Guidelines

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi non-profit yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi. GRI telah mengeluarkan salah satu standar yang paling umum di dunia untuk pelaporan keberlanjutan – dikenal sebagai *ecological footprint reporting, environmental social governance (ESG) reporting, triple bottom line (TBL) reporting, corporate social responsibility (CSR) reporting*. GRI berusaha untuk membuat laporan keberlanjutan dengan semua organisasi agar rutin dan dapat dibandingkan seperti laporan keuangan.

GRI baru saja meluncurkan standar pelaporan keberlanjutan generasi keempat pada 22 Mei 2013 di Amsterdam. Standar baru ini- G4- memuat berbagai perubahan signifikan dibandingkan dengan standar sebelumnya, dan sangat penting untuk dilihat sebagai tonggak penting dalam wacana dan praktek pembangunan berkelanjutan (TEMPO.CO, 2013).

2.7.1 Prinsip Pengungkapan dalam Laporan Keberlanjutan

Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Perusahaan harus mengidentifikasi para stakeholders, dan sejauh mana perusahaan telah berhasil melaksanakan sesuai ekspektasi dan kepentingan *stakeholder*.

2. Konteks Keberlanjutan

Sustainability report harus memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

3. Materialitas

Sustainability report harus mencakup aspek-aspek berikut, yaitu: 1) refleksi organisasi mengenai ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial 2) secara nyata mempengaruhi pencapaian dan keputusan dari *stakeholders*,

4. Kelengkapan

Laporannya harus mencakup aspek material dan batasan, refleksi tentang ekonomi, lingkungan dan dampak sosial, dan mempersilahkan *stakeholders* untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam laporan tahunan.

Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan

Laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan guna memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan.

2. Komparibilitas

Perusahaan harus memilih, mengkompilasi, dan melaporkan informasi secara konsisten. Laporan tersebut harus dibuat secara seksama untuk memungkinkan *stakeholder* membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.

3. Akurasi

Informasi dalam laporan harus akurat dan detail untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan

4. Ketepatan Waktu

Laporan harus dilaporkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk dapat digunakan oleh *stakeholders* tepat pada waktunya sebagai informasi dalam pengambilan keputusan.

5. Kejelasan

Perusahaan harus membuat informasi yang tersedia sesuai dengan peraturan yang ada agar dapat dimengerti dan dapat diakses oleh *stakeholders*.

6. Keandalan

Perusahaan harus menggabungkan, mencatat, menyusun, menganalisis dan mengungkapkan informasi dan memproses dalam persiapan laporan dengan baik agar dapat menjelaskan mengenai kualitas dan meterialitas informasi.

2.7.2 Pengungkapan dalam Laporan Keberlanjutan

Pengungkapan dalam sustainability report berdasarkan pada GRI-G4 yang terdiri dari 3 kategori, 50 aspek dan 56 item pengungkapan GRI untuk sektor pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut.

Tabel. 1 Kategori dan Aspek pengungkapan Laporan Keberlanjutan

No.	Kategori	Sub-Kategori	Aspek
1	Ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Ekonomi • Keberadaan di Pasar • Dampak Ekonomi Tidak Langsung • Praktik Pengadaan
2	Lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> • Bahan • Energi • Air • Keanekaragaman Hayati • Emisi • Efluen dan Limbah • Produk dan Jasa • Kepatuhan • Transportasi • Lain-lain • Asesmen Pemasok atas Lingkungan • Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan
3	Sosial	Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepegawaian • Hubungan Industrial • Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Pelatihan dan Pendidikan • Keberagaman dan Kesetaraan Peluang • Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki • Asesmen Pemasok atas praktik ketenagakerjaan • Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan
		Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi • Non-diskriminasi

			<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama • Pekerja anak • Pekerja paksa atau wajib kerja • Praktik pengamanan • Hak adat • Asesmen • Asesmen pemasok atas Hak Asasi Manusia • Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia
		Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat lokal • Anti-korupsi • Kebijakan publik • Anti persaingan • Kepatuhan • Asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat • Mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat • Kesiapsiagaan darurat • Pemukiman kembali • Integritas aset dan keamanan proses • Bahan bakar pengganti fosil
		Tanggung Jawab atas Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan dan keselamatan pelanggan • Pelabelan produk dan jasa • Komunikasi pemasaran • Privasi pelanggan • Kepatuhan

Sumber :GRI-G4 dan GRI Oil and Gas Sector Guidelines

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Eleanor	CSR in Asia : A	H1 : CSR di Asia	Hipotesis 1

Chambers, Wendy Chapple, Jeremy Moon, dan Michael Sullivan	<i>Seven Country Study of CSR Website Reporting</i>	ketinggalan dibandingkan di Barat H2 : CSR di Asia tergantung akan faktor nasional H3 : CSR di Asia akan digerogoti oleh Globalisasi H4 : CSR di Asia akan meningkat seiring dengan globalisasi	ditolak, karena ada perbedaan penetrasi di Asia dengan di Barat. Hipotesis 2 diterima, tingkat CSR di masing-masing negara Asia dipengaruhi oleh faktor nasional negara tersebut. Hipotesis 3 dan 4 ditolak, globalisasi (bukan westerniasi) merupakan kunci dalam menggerakkan CSR di Asia
Nagib Salem Bayoud, Marie Kavanagh, dan Geoff Slaughter	<i>Factors Influencing levels of Corporate Social Responsibility Disclosure by Libyan Firms : A mixed Study</i>	X = Ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan tipe industri Y= <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Hasil penelitian umur perusahaan memiliki pengaruh yang paling signifikan dan diikuti oleh tipe industri yang memiliki pengaruh signifikan terhadap CSR. Sedangkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi CSR.
Sri Utami dan Sawitri Dwi Prastiti (2011)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap <i>Social Disclosure</i>	X=NPM, ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>leverage</i> , dan kepemilikan manajemen Y= <i>Social Disclosure</i>	NPM dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>social disclosure</i> . Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap <i>social disclosure</i>

Yulius Ardy Wiranata dan Yeterina Widi Nugrahanti (2013)	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia	X= Kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi dan kepemilikan keluarga. Variabel kontrol= ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> . Y=ROA	Kepemilikan asing dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
Novita Machmud dan Chaerul D. Djakman (2008)	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nila Perusahaan Survey Pada Perusahaan Manufaktur di Pt. BEI	X= Kepemilikan asing dan kepemilikan institusi Y=CSR	Kepemilikan asing dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh secara signifikan pada CSR.

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Corporate*

Social Responsibility (CSR)

Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia pada umumnya memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melaksanakan program CSR dibanding perusahaan domestik. Perusahaan multinasional terutama perusahaan Eropa dan United State sangat mengedepankan isu-isu sosial dan isu lingkungan

(Machmud dan Djakman, 2008). Penerpan CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai akibat dari peningkatan nilai perusahaan asing setelah menerapkan CSR di dalam operasional perusahaan.

Maka dari itu, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders*, maka perusahaan akan didukung secara penuh dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR. Tanimoto dan Suzuki (2005) meneliti luas pengungkapan tanggungjawab sosial dalam laporan keuangan pada perusahaan publik di Jepang, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap banyaknya pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan GRI. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan lebih baik akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.9.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan. Keberadaan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitar. Sebuah perusahaan yang memahami harapan masyarakat akan lebih mudah mempertahankan eksistensinya ditengah-

tengah masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori legitimasi. Teori ini merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat. Perusahaan yang berpihak kepada masyarakat akan lebih mudah memahami keinginan masyarakat. Dengan demikian legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan dalam bertahan hidup. Teori ini juga menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima masyarakat. Sehingga semakin lama perusahaan dapat bertahan, maka perusahaan semakin mengungkapkan informasi sosialnya sebagai bentuk tanggung jawabnya agar tetap diterima masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR)

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran Penelitian

